ABSTRAK

Kehadiran Pedagang Kaki Lima menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau dan sebagainya. Untuk itu diperlukan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja karena merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam fungsi pengawasan, pengendalian dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Walaupun telah diberikan peringatan terhadap pedagang kaki lima tersebut akan tetapi, masih banyak juga pedagang kaki lima yang berdagang tidak sesuai dengan tempatnya. Untuk itu, dilakukan penelitian dengan tipe penelitian yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan etiologi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada sampel dalam penelitian ini yaitu satu orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan satu orang dari pedagang kaki lima sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Wilayah Pasar Jambi adalah Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan perannya yaitu penegakkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Jambi dan kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Pasar Jambi adalah para pedagang yang telah memiliki ruko yang melanggar Perda tersebut dan dan upaya mengatasinya yaitu menerapkan sanksi denda sesuai dengan isi Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan disesuaikan juga dengan kemampuan para pedagang jika tidak tercapai sanksi denda tersebut.

Kata Kunci :Satuan Polisi Pamong Praja, **Pedagang Kaki Lima, Pasar Jambi**

ABSTRACT

The presence of street vendors creates conflict when they use public spaces that they consider economically strategic, such as roads, sidewalks, green lanes and so on. For this reason, the role of the Civil Service Police Unit is needed because it is one of the institutions that has the authority to supervise, control and regulate street vendors. Even though warnings have been given to street vendors, there are still many street vendors who trade inappropriately. For this reason, research was carried out with the type of research, namely empirical juridical, using an etiological approach. The data sources used are primary data and secondary data and the data collection technique was carried out by direct interviews with the sample in this study, namely one person from the Jambi City Civil Service Police Unit and one person from a street vendor so that the data analysis used in this research is qualitative analysis. The results of this research discussion are that the role of the Civil Service Police Unit in carrying out control over street vendors in the Jambi Market Area is that the Civil Service Police Unit has carried out its role, namely enforcing Jambi City Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors against Street Vendors. Lima (PKL) in the Jambi market and the obstacles experienced by the Civil Service Police Unit in carrying out control of Street Vendors in the Jambi Market Area are traders who already own shophouses which violate the Regional Regulation and the effort to overcome this is by applying fines in accordance with the contents of Article 34 of the Regulation Jambi City Region Number 12 of 2016 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors and is also adjusted to the traders' abilities if the fine is not met.

Keywords: Civil Service Police Unit, Street Vendors, Jambi Market